DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Erna Sri Wibawanti dan R. 2013. *Hak atas Tanah dan Peralihannya.* Yogyakarta: Liberty.

H.A.W Widjaja. 2019. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: PT. RajaGrafindo.

Hasni. 2016. *Edisi Ketiga: Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel; Edisi Revis.* Yogyakarta: Mirra Buana Media.

J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. 2020. *Teori Hierarki Norma Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press.

Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik.* Bandung: Nuansa Cendekia.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2018., *Kamus Istilah Hukum Populer.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Lukman Hakim. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.

Muhammad Erwin. 2013. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Muhtar Said. 2019. *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.

Munir Fuady. 2023. *Teori-Teori dalam Hukum Agraria*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Mustofa dan Suratman. 2013. *Penggunaan Hak ata Tanah untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika.

Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah).* Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Reko Dwi Saputra. 2019. *Hukum Agraria Indonesia.* Yogyakarta: Thafa Media.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. 2014. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso - I). 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Urip Santoso. 2015. *Perolehan Hak atas Tanah*. Depok: Kencana.

Tesis

Ani Setiawati tahun. 2020. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hunian Tetap Pasca Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuefaksi di Palu ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012.* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Thio Haikal Anugerah. 2022. *Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Hunian Tetap dan Tahapan Penyelesaian Hak Atas Tanah Masyarakat Korban Tsunami di Lampung Selatan.* Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jurnal, Prosiding, dan Artikel Lainnya:

Andjar Prasetya. *et.al.* 2024. Critical communication of disaster preparedness areas for informational strategies in disaster management in Indonesia*. Progress in Disaster Science*. Vol. 24.

Dimas Dwiki Sumarsono. 2021. Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Untuk Mengatasi Permasalahan Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum.* Vol 4. No. 2.

Endang Pratiwi. Theo Negoro. dan Hassanain Haykal. 2022. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19. No. 2.

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati. 2024. Tujuan. Fungsi. dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.* Vol. 2. No. 2.

Franziska Atwii. *et.al.* 2022. *WorldRiskReport2022*. Collaboration with Welthungerhilfe. Bündnis Entwicklung Hilft. dan Peace and Armed Conflict (IFHV).

Habib Ferian Fajar Julfahmi Syahputra. dan Mareta Puri Nur Ayu Ningsih. 2022. Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.* Vol. 3. No. 9.

I Gede Widhiana. 2016. Kriminalisasi dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Jurnal Supremasi.* Vol. 6 No. 2.

Keysha Nashwa Auilia. dkk. 2024. Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Jurnal Sains Student Research.* Vol. 2. No. 1.

Muzakar Iza. 2016. Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?. *The 3rd University Research Colloquium 2016*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

N O Anidhea dan Suliyanah. 2021. Identifikasi Karakteristik Struktur Tanah Dan Mitigasi Bencana Likuifaksi di Sulawesi Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Fisika (SNF) Unesa 2021.* Vol. 5.

Risma Sunarty dan Muhammad Nur Akmal. 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Serambi Konstruktivis.* Vol. 6. No. 2.

Sugeng Yulianto. *et.a.* 2021. Histori Bencana dan Penanggulangannya ditinjau dari Perspektif Keamanan Nasional. *PENDIPA Journal of Science Education.* Vol. 5 No. 2.

Verissa Annagris Passadi. dkk. 2023. Auguste Comte dalam Positivisme Hukum. *Nusantara: Jurnal Pendidikan. Seni. Sains. dan Sosial Humaniora.* Vol. 1. No. 2. Hlm. 9.

Sumber-Sumber Internet:

Badan Bank Tanah. Reforma Agraria. diakses melalui https://banktanah.id/reforma-agraria/.

Data Informasi Bencana Indonesia. 2024. *Statistik Bencana. Korban dan Kerusakan Menurut Waktu.* Diakses melalui: https://dibi.bnpb.go.id/statistik_menurut_waktu.

Kristianto Purnomo. 2018. *BNPB Catat Kerugian Dampak Bencana Sulteng Menjadi Rp 18.48 Triliun.* Diakses melalui: https://nasional.kompas.com/read/2018/10/28/19120431/bnpb-catat-kerugian-dampak-bencana-sulteng-menjadi-rp-1848-triliun.

Moh Syafari Firdaus. 2020. *Penyediaan Hunian Tetap dan Permasalahannya*. Diakses melalui: https://monitoring.skp-ham.org/penyediaan-hunian-tetap-dan-permasalahannya/.

Newswire. 2019. *Kerugian Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah Capai Rp18.48 Triliun.* Diakses melalui: https://sulawesi.bisnis.com/read/20190503/539/918204/kerugian-akibat-gempa-bumi-dan-tsunami-di-sulawesi-tengah-capai-rp1848-triliun.

Minnie Rivai. 2024. *TORA Masuk Kuasa Bank Tanah. Warga Sigi Menolak. Keluhkan Kepastian Hak Lahan.* diakses melalui: https://mongabay.co.id/2024/03/13/tora-masuk-kuasa-bank-tanah-warga-sigi-menolak-keluhkan-kepastian-hak-lahan/.

Ridwan Mustajab. 2023. *Kerugian Akibat Bencana Alam Mencapai Rp1.06 Triliun pada 2022*. Diakses melalui: https://dataindonesia.id/varia/detail/kerugian-akibat-bencana-alam-mencapai-rp106-triliun-pada-2022.

The Opini. Menteri ATR/BPN Setujui Pemanfaatan Lahan HGU Eks PT. Hasfarm di Sigi. diakses melalui https://theopini.id/2022/09/30/menteri-atr-bpn-setujui-pemanfaatan-lahan-hgu-eks-pt-hasfarm-di-sigi/#google_vignette.

Universitas Pertamina. 2024. *Indonesia Rawan Bencana; Teknik Geologi UPER Ambil Peran dengan Memberikan Edukasi tentang Mitigasi dan Adaptasi Bencana*. Diakses melalui: https://universitaspertamina.ac.id/berita/detail/indonesia-rawan-bencana-teknik-geologi-uper-ambil-peran-dengan-memberikan-edukasi-tentang-mitigasi-dan-adaptasi-

bencana#:~:text=Hal%20tersebut%20dikarenakan%20wilayah%20Indonesia.longsor%2C%20banjir%2C%20dan%20lainnya.

Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lainnya:

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah terdampak lainnya perlu menyusun rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.126 /M.PPN /HK/ 11 / 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tentang Hak Pengelolaan. Hak Atas Tanah. Satuan Rumah Susun. dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria;

Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029

Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 592-518 tahun 2022 tentang Penetapan Calon Subjek Peserta Redistribusi Tanah Eks. Hak Guna Usaha PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi;

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 369/516/DIS.BMR-G.ST/2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Dokumen Pendukung:

Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kemterian ATR/BPN. 2021. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform tahun 2021.

Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018.

Rencana Pendayagunaan Lahan Kawasan Hunian Tetap Pombewe (Eks. HGU PT. Hasfarm Hortikultura Sulawesi) Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru dan Desa Oloboju Kecamatan Sigi Kota. tahun 2022.